



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 124 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kampung dan Kampung Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dan Kampung Adat (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 184) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 10.a Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 10.a)
- b. Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 19)

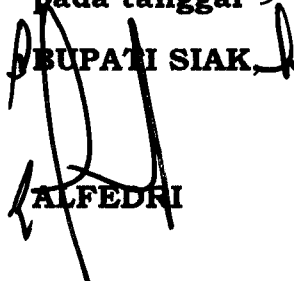
diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 24 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

FORMAT KODE REKENING, RINCIAN ASET TETAP KAMPUNG, LAPORAN REALISASI KEGIATAN, LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN, LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN KAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN KAMPUNG, LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG MENURUT BIDANG KEWENANGAN DAN LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06))
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Penghulu dan Perangkat Kampung
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BAPEKAM
1	1	06	Penyediaan Operasional BAPEKAM (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RK
1	1	90	Tunjangan Purnabakti
1	1	91-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)**

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Kampung (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Penghulu/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Kampung
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Antar Kampung/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BAPEKAM (yang menjadi wewenang Kampung)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya Untuk Kampung Persiapan
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Kampung
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Kampung**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kampung/Perawat Kampung; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Kampung
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Kampung
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung**
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendukung proses pembangunan Kampung yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kampung
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Kampung
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMK
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
4	3	01	Peningkatan kapasitas Penghulu
z	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Kampung
4	3	03	Peningkatan kapasitas BAPEKAM
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKampungan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kampung)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milik Kampung
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Kampung
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKampungk Kampung digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan MenKampungk.
5	3	00	Keadaan MenKampungk

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Kampung, misal : pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Kampung
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUM Kampung
4	1	1	90-99	Lain - lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Kampung
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Kampung
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Kampung
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Kampung
4	1	2	07	Kios Milik Kampung
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kampung
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung
4	1	4	01	Hasil Pungutan Kampung
4	1	4	90-99	Lain-lain

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Kampung yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat Kampung
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Penghulu
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Kampung
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Penghulu
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Kampung
5	1	4		Tunjangan BAPEKAM
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BAPEKAM
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BAPEKAM
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Kampung/ Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kampung
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKK dan PPKK
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BAPEKAM
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku/Pelatihan/Seminar/Bimbingan teknis
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	08	Belanja insentif/Operasional RT/RK
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Kampung
4	2	1	01	Dana Kampung
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Kampung
4	2	3	01	Alokasi Dana Kampung
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Kampung yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Kampung yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Penghulu
5	1	1	02	Tunjangan Penghulu
5	1	1	90	Tunjangan Purnabakti
5	1	1	91-99	Penerimaan Lain Penghulu yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Kampung

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Kampung
6	2	2	01	Penyertaan Modal Kampung
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

B.1. Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung



PENGHULU

KABUPATEN SIAK

PERATURAN KAMPUNG...

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.....

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU.....,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor..... Tahun.... tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
5. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ...
dan
PENGHULU ...
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
2. Belanja Kampung	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKampung;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Penghulu menetapkan Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKampungk yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kampung tentang perubahan APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Penghulu dapat mendahului perubahan APB Kampung dengan melakukan perubahan Peraturan Penghulu tentang Penjabaran APBKampung dan memberitahukannya kepada BAPEKAM.

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung...(Nama Kampung).

Ditetapkan di
pada tanggal

PENGHULU ..(Nama Kampung)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

KERANI ... (Nama Kampung),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR....

(KOP BAPEKAM)

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KECAMATAN

NOMOR

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.....**


BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) setiap tahun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Kampung Tahun Anggaran 20...
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor.....Tahun.... tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
5. Dst...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**
KECAMATAN.....TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.....

SATU : menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Tahun Anggaran 20.....Sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
2. Belanja Kampung	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

KEDUA : Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Tahun Anggaran 201....;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dana disesuaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di

pada tanggal 20...

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG**

.....

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kantor/Balai Kampung Kecamatan Kabupaten Siak telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Kampung, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Kampung, serta Penghulu, Perangkat Kampung dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBKampung) Kampung Tahun 20.....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKampung) Kampung Tahun 20..... dengan rincian :

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
2. Belanja Kampung	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

2. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBKampung) KampungKecamatan..... Tahun 20... untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKampung) dengan menetapkan Peraturan Kampung.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kampung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kampung),20...

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

WAKIL KETUA

KETUA

.....

.....

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

RAPAT : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 20....

KAMPUNG :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1.
2		Wakil Ketua	2.
3		Sekretaris	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.
9		Anggota	9.
10		Anggota	10.
11		Anggota	11.

(Kampung).....,20...

KETUA

BADAN PERMUSWARATAN KAMPUNG

KETERANGAN

- 1. Jumlah Anggota :orang
- 2. Hadir :orang
- 3. Tidak Hadir :orang

.....

DAFTAR HADIR PERANGKAT KAMPUNG DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 20...

KAMPUNG :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
Dst..			Dst.

(Kampung), 20....

PENGHULU.....

.....

B.2. Format APBKampung

Lampiran : Peraturan Kampung
 Nomor :
 Tahun : 20...

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG.....
 TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2		3	4
a	b	c	a	b		5
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PAKampung	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,	
					Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
					Penghulu	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	
					Statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
					(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Kampung	
2	1				Pendidikan	
2	1	;0			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
					Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan	
2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan	
					Mendesak	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS /(DEFISIT)	
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

.....
 Penghulu,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian :

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:

- a.
- b.

Bagian Belanja diisi:

- a.
- b.

- Bagian Pembiayaan diisi:

- a.
- b.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun Anggaran

terdiri dari:

- 1. Pendapatan Kampung
 - a. Pendapatan Asli Kampung Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - Dana Kampung Rp.....
 - Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Rp.....
 - Alokasi Dana Kampung Rp.....
 - Bantuan Provinsi Rp.....
 - Bantuan Kabupaten Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....

Jumlah Pendapatan Rp.....

- 2. Belanja Kampung
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kampung Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/(Defisit) Rp.....

- 3. Pembiayaan Kampung
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
- Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Penghulu ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Penghulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Penghulu ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung (Nama Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal
PENGHULU (Nama Kampung)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),
tanda tangan

NAMA

BERITA KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR

C.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung



PENGHULU

KABUPATEN SIAK

PERATURAN PENGHULU.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.....

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU.....

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Kampung Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....(Nama Kampung) Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor....Tahun.... tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun..Nomor... Seri...);
8. Dst...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENGHULU..... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.... TAHUN ANGGARAN

C.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Lampiran : Peraturan Kampung

Nomor :

Tahun : 20...

**FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING				URAIAN				KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1		2		3				4	5		
a	b	c	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4 1				PAKampung				
			4 1	1			Hasil usaha				
			4 1	1	01		Bagi Hasil BUMKampung				
			4 1	1		<Obyek Pendapatan>				
			4 1	2			Hasil aset				
			4 1	3			Swadaya, partisipasi dan gotong royong				
			4 1	4			Pendapatan Asli Kampung lain				
			4 2				Transfer				
			4 2	1			Dana Kampung				
			4 2	2			Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
			4 2	3			Alokasi Dana Kampung				
			4 2	4			Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				
			4 2	5			Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten				
			4 3				Pendapatan lain-lain				
			4 3	1			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kampung				
			4 3	1	01		<Obyek Pendapatan>				
			4 3	2			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga				
			4 3	3			Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung				
			4 3	4			Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga				
			4 3	5			Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kampung pada tahun anggaran berjalan				
			4 3	6			Bunga bank dst.....				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung				
1 1							Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung				
1 1	01						Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu				
1 1	01	5	1				Belanja Pegawai				
1 1	01	5	1	1			Penghasilan Tetap & Tunjangan Penghulu				
1 1	01	5	1	1	01		Penghasilan Tetap Penghulu				
1 1	02	5	1	1	02		Tunjangan Penghulu				
1 1	01	5	1	2			Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Kampung				
1 1	01	5	1	2	01		Penghasilan Tetap Perangkat Kampung				
1 1	02	5	1	2	02		Tunjangan Perangkat Kampung				
1 1	01	5	1	2	...		<Rincian Obyek Belanja>				
1 3							Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1 3	01						Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)				
1 3	01	2	2				Belanja Barang dan Jasa				
1 3	01	2	2	2			Belanja Jasa Honorarium				
1 3	01	2	2	2	...		<Rincian Obyek Belanja>				
2							Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2 1							Pendidikan				
2 1	05						Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar				
2 1	05	5	3				Belanja Modal				
2 1	05	5	3	4			Belanja Modal Gedung dan				
1 1	05	5	3	4	...		<Rincian Obyek Belanja>				

1			2				3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	3					Penanggulangan Bencana				
5	1	3	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	3	5	4	1		Belanja Tak Terduga				
5	1	3	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS /(DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	01	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan				
		ds									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

....., 20
PENGHULU

.....

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

D.1 RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG Perubahan APBKampung



PENGHULU

KECAMATAN

KABUPATEN SIAK

RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG

KECAMATAN NOMOR TAHUN

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya target dan adanya kebutuhan yang mendesak, maka strategi dan prioritas program kerja mengalami perubahan, maka perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.... Tahun Anggaran...;
- a. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20...;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor....Tahun.... tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
7. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

dan

PENGHULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG
KECAMATAN.....TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN.....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran.... semula berjumlah Rp. (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp. (.....) sehingga menjadi Rp. (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Kampung
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Kampung
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah penerimaan setelah perubahan
 - 3.1 Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Penghulu menetapkan Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kampung.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung.....

Ditetapkan di
pada tanggal
PENGHULU (Nama Kampung)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR

(KOP BAPEKAM)

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KECAMATAN

NOMOR

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG**

TAHUN ANGGARAN 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya target dan adanya kebutuhan yang mendesak, maka strategi dan prioritas program kerja mengalami perubahan, maka perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun Anggaran...;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) setiap tahun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf adan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Kampung Tahun Anggaran 20...
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor....Tahun... tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran...(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran...(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
5. Dst...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**
KECAMATAN.....TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.....

KESATU : menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Tahun Anggaran 20.....Sebagai berikut :

1. Pendapata Kampung
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Kampung
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....

3.	Pembiayaan Kampung	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp.....
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp.....
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.....
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b)	Rp.....

KEDUA : Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Tahun Anggaran 201....;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dana disesuaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di

pada tanggal 20...

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG**

.....

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kantor/Balai Kampung Kecamatan Kabupaten Siak telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Kampung, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Kampung, serta Penghulu, Perangkat Kampung dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBKampung) Kampung Tahun 20.....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKampung) Kampung Tahun 20..... dengan rincian :
 1. Pendapata Kampung
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
 2. Belanja Kampung
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
 3. Pembiayaan Kampung
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah penerimaan setelah perubahan
 - 3.1 Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b) Rp.....
2. Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBKampung) KampungKecamatan..... Tahun 20... untuk segera ditetapkan menjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKampung) dengan menetapkan Peraturan Kampung.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kampung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kampung),20...

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

WAKIL KETUA

KETUA

.....

.....

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

RAPAT : Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 20....

KAMPUNG :.....

KECAMATAN :.....

TANGGAL :.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1.
2		Wakil Ketua	2.
3		Sekretaris	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.
9		Anggota	9.
10		Anggota	10.
11		Anggota	11.

(Kampung).....,20...

KETUA

BADAN PERMUSWARATAN KAMPUNG

KETERANGAN

- 1. Jumlah Anggota :orang
- 2. Hadir :orang
- 3. Tidak Hadir :orang

.....

DAFTAR HADIR PERANGKAT KAMPUNG DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 20...

KAMPUNG :.....

KECAMATAN :.....

TANGGAL :.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
Dst..			Dst.

(Kampung), 20....

PENGHULU.....

.....

D.2. Format PERUBAHAN APBKampung

Lampiran : Peraturan Kampung

Nomor :

Tahun : 20...

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING			SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			URAIAN	ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN		
a	b	c	3	4	5	6	7	8
		2						
		a						
		b						
		4	PENDAPATAN		PENDAPATAN			
		4 1	PAKampung		PAKampung			
		4 2	Transfer		Transfer			
		4 3	Pendapatan lain-lain		Pendapatan lain-lain			
			JUMLAH PENDAPATAN		JUMLAH PENDAPATAN			
		5	BELANJA		BELANJA			
1	1		Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung		Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung			
1	1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung			
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu			
1	1	01	Belanja Pegawai		Belanja Pegawai			
1	3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
1	3	01	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Barang dan Jasa			
2	1		Pelaksanaan Pembangunan Kampung		Pelaksanaan Pembangunan Kampung			
2	1		Pendidikan		Pendidikan			
2	1	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kampung/Sanggar Belajar		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kampung/Sanggar Belajar			
2	1	05	Belanja Modal		Belanja Modal			
5	1		Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
5	1		Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana			
5	1		Belanja Tak Terduga		Belanja Tak Terduga			
5	1		Keadaan Darurat		Keadaan Darurat			
5	1		Belanja Tak Terduga		Belanja Tak Terduga			
		dst						
			JUMLAH BELANJA		JUMLAH BELANJA			
			SURPLUS / (DEFISIT)		SURPLUS / (DEFISIT)			

1		2		3		4		5		6		7		8	
a	b	c	a	b											
			6		PEMBIAYAAN										
			6	1	Penerimaan Pembiayaan										
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan										
					SELISIH PEMBIAYAAN										
					PEMBIAYAAN										
					Penerimaan Pembiayaan										
					Pengeluaran Pembiayaan										
					SELISIH PEMBIAYAAN										

.....
Penghulu,

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
- Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
- Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
- Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
- Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
- Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
- Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
- Kolom 8 : diisi dengan

E.1. Format Rancangan Penghulu tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung



PENGHULU
KABUPATEN SIAK
PERATURAN PENGHULU.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG..... TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU.....

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Kampung Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....(Nama Kampung) Tahun Anggaran

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Presiden Nomor....Tahun.... tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor... Seri...);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun..Nomor... Seri...);
 8. Dst...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENGHULU..... TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran.... semula berjumlah Rp. (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp. (.....) sehingga menjadi Rp. (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung

a. Pendapatan Asli Kampung	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Pendapatan asli Kampung setelah perubahan	Rp.....
b. Transfer	
- Dana Kampung	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Dana Kampung setelah perubahan	Rp.....
- Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.....
- Alokasi Dana Kampung	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Alokasi Dana Kampung setelah perubahan	Rp.....
- Bantuan Provinsi	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Bantuan Provinsi setelah perubahan	Rp.....
- Bantuan Kabupaten	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Bantuan Kabupaten setelah perubahan	Rp.....
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.....

2. Belanja Kampung

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	
a. Semula	
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	
b. Bidang Pembangunan	
a. Semula	
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kampung
 - a. Semula
 - b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan ████████████████████
 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.....
 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Kampung
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
- Selisih Pembiayaan (a – b) setelah perubahan Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Penghulu ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBKampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan juru Tulis pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Penghulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Penghulu ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung

Ditetapkan di
 pada tanggal
 PENGHULU

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
 pada tanggal ...
 SEKRETARIS KAMPUNG ...

tanda tangan

NAMA

BERITA KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

E.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Lampiran : Peraturan Kampung

Nomor :

Tahun :

20...

**FORMAT PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING			SEMULA		MENJADI		URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN	BETAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DAYA
1	2	3	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT VOLUME	OUTPUT SATUAN	VOLUME					
a	b	c	d								
4	1	1	01	PENDAPATAN							6
4	1	1	01	PAKampung							
4	1	1	01	Hasil usaha							
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMKampung							
4	1	1	01	<Obyek Pendapatan>							
4	1	2		Hasil aset							
4	1	3		Swadaya, partisipasi dan gotong royong							
4	1	4		Pendapatan Asli Kampung lain							
4	2			Transfer							
4	2	1		Dana Kampung							
4	2	2		Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten							
4	2	3		Alokasi Dana Kampung							
4	2	4		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi							
4	2	5		Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten							
4	3			Pendapatan lain-lain							
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kampung							
4	3	1	01	<Obyek Pendapatan>							
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga							
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung							
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga							
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kampung pada tahun anggaran berjalan							
4	3	6		Bunga bank							
				dst.....							
				JUMLAH PENDAPATAN							
5				BELANJA							
1	1			Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung							
1	1			Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung							
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu							
1	1	01	5	Belanja Pegawai							
1	1	01	5	Penghasilan Tetap & Tunjangan Penghulu							
1	1	01	5	Penghasilan Tetap Penghulu							

1		2			3			4			5	6
a	b	c	a	b	c	d						
1	1	02	5	1	1	02	Tunjangan Pengulu					
1	1	01	5	1	2	01	Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Kampung					
1	1	01	5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung					
1	1	01	5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Kampung					
1	1	02	5	1	2	02	<Rincian Obyek Belanja>					
1	1	01	5	1	2	...	Administrtasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)					
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa					
1	3	01	2	2	02		Belanja Jasa Honorarium					
1	3	01	2	2	02	...	<Rincian Obyek Belanja>					
2	2	1					Pelaksanaan Pembangunan Kampung Pendidikan					
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar					
2	1	05	5	3			Belanja Modal					
2	1	05	5	3	04		Belanja Modal Gedung dan					
1	1	05	5	3	04	...	<Rincian Obyek Belanja>					
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak					
5	1	00					Penanggulangan Bencana					
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga					
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga					
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga					
							JUMLAH BELANJA					
							SURPLUS / (DEFISIT)					
							PEMBIAYAAN					
			6	1			Penerimaan Pembiayaan					
			6	1	01		SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	1	01	01	SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan					
			6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan					
			6	2	02	01	Pembentukan Dana Cadangan					
			dst.....				SELISIH PEMBIAYAAN					

Cara pengisian:
 Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
 Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
 Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
 Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
 Kolom 5 : diisi dengan jumlah anggaran yang berubah
 Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

.....**PENGHULU** 20

1		2				3			4	5	6			7
a	b	c	a	b	c	d								
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga							
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga							
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga							
			dst											

Diverifikasi oleh:
Kerani,

.....
Kaur/Juru Tulis.....
 (.....)

(.....)

Disetujui oleh:
Penghulu

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Kampung sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
- Kolom 6 : diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja
- Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan

H. Format DPA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KAMPUNG..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui,

Penghulu **Kaur/Juru Tulis.....**

(.....)

(.....)

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APBKampung
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APBKampung
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APBKampung
4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

I. Format DPPA

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA		MENJADI		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)												JUMLAH	
		ANGGARAN		ANGGARAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
		Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber														
1	3	4	5	6	7	8												9	
1 a	1 b	1 c	1 a	1 b	1 c	1 d													
1 1	1 1 01	1 1 01 5	1 1 01 5	1 1 01 5	1 1 01 5	1 1 01 5	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu Belanja Pegawai Penghasilan Tetap & Tunjangan Penghulu <Rincian Obyek Belanja> Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan administrasi dan kependudukan (Surat Pengantar/ PelayananKTP, Kartu Keluarga, dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium <Rincian Obyek Belanja> Pelaksanaan Pembangunan Kampung Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar												
1 3 01	1 3 01 5	1 3 01 5	1 3 01 5	1 3 01 5	1 3 01 5	1 3 01 5													
2 1	2 1 05	2 1 05	2 1 05	2 1 05	2 1 05	2 1 05													

1		2				3			4			5			6			7			8			9		
a	b	c	a	b	c	d																				
2	1	05	5	3			Belanja Modal																			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan																			
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>																			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak																			
5	1						Penanggulangan Bencana																			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana																			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga																			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga																			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga																			

Diverifikasi oleh:

Kerani,

(.....)

.....

Kaur/juru Tulis.....

(.....)

Disetujui oleh:

Penghulu,

(.....)

1		2			3				4				5				6			
a	b	c	a	b	c	d														
2	1	05	5	3			Belanja Modal													
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan													
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>													
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak													
5	1						Penanggulangan Bencana													
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana													
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga													
							dst													
							JUMLAH BELANJA													
							SURPLUS / (DEFISIT)													
							PEMBIAYAAN													
							Penerimaan Pembiayaan													
							SiLPA Tahun Sebelumnya													
							6 1 1 1													
							6 1 1 01													
							Pengeluaran Pembiayaan													
							Pembentukan Dana Cadangan													
							6 2 1													
							6 2 1													
							6 2 2 01													
							dst													
							SELISIH PEMBIAYAAN													
							Jumlah Total Penerimaan													
							Jumlah Total Pengeluaran													
							Selisih Penerimaan dan Pengeluaran													

Diverifikasi oleh:

Kerani,

(.....)

Disetujui oleh:

Penghulu,

(.....)

.....
Kaur/juru Tulis.....

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3, 4 :

Kolom 5 :

Kolom 6 :

diisi sesuai dengan Penjabaran APBKampung

diisi dengan:

- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Juru Tulis Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran penghasilan tetap, untuk belanja turjangan operasional Aparatur Kampung
- Pembayaran diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
- diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.1. Buku Pembantu Kegiatan

BUKU PEMBANTU KEGIATAN
KAMPUNG..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas (Rp.)	Pengeluaran (Rp)		Pengembalian ke Kas Desa (Rp.)	Saldo Kas (Rp.)
					Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah					
			Total Penerimaan		Total Pengeluaran			
					Total Pengeluaran + Saldo Kas			

.....
Kaur/Juru Tulis

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
- Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
- Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
- Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
- Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
- Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
- Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
KAMPUNG..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Kegiatan:

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti Setor ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
				Uang (Rp)	Barang/ Tenaga (Volume)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah				
			Total				

.....
Kaur/Juru Tulis

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
- Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
- Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
- Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
- Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

M. Surat Permintaan Pembayaran

M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
KAMPUNG..... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Pencairan s.d yg lalu (Rp.)	Permintaan Sekarang (Rp.)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Telah dilakukan verifikasi
kerani,

.....
Kaur/ juru Tulis.....
 (.....)

Disetujui untuk dibayarkan
Penghulu,

Telah dibayar lunas
Bendahara,
 (.....)

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBKampung
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APBKampung
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APBKampung
4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
KAMPUNG..... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
 Kaur/Juru Tulis.....

(.....)

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBKampung.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBKampung.
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBKampung.
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan : Tahun :

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

1	a	b	c	d	URAIAN				OUTPUT					SUMBER DANA			Bentuk Lain
					Volume	Rencana Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Realisasi Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain- Lain (Rp)	12	13	
	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Jumlah												

.....

Kaur/Juru Tulis
 ttd

(.....)

Cara pengisian:
 Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
 Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APBDKampung
 Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
 Kolom 5 : diisi satuan volume:
 - jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
 - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
 - kegiatan non fisik - paket
 Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
 Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang direalisasi
 Kolom 8 : diisi dengan volume yang terealisasi
 Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
 Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
 Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Kampung
 Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Kampung
 Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung
 Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

O. Format DPAL

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*
TAHUN ANGGARAN**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI				LANJUTAN				
		Jumlah (Rp)	Sumber	Anggaran		Volume kegiatan	Jumlah Anggaran	Waktu Penyelesaian	Penarikan Anggaran (Rp)			
				Jumlah (Rp)	%				Jan	Feb	Mar	Jumlah
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a												
b												
c												
d												

Diverifikasi oleh:

Kerani,

(.....)

Disetujui oleh:

Penghulu,

(.....)

.....
Kaur/juru Tulis.....

(.....)

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilanjutkan saja

P. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	TGL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NOMOR BUKTI	NETTO TRANSAKSI (Rp)	SALDO (Rp)
1	2							
		a						
		b						
		c						
		d						
JUMLAH								

Diverifikasi oleh:
Kerani,

(.....)

.....
Bendahara,

(.....)

Disetujui oleh:
Penghulu,

(.....)

Cara pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APBKampung
- Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APBKampung
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
- Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
- Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi
- Kolom 9 : diisi dengan saldo kas.

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum

Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK
KAMPUNG..... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

BULAN :
BANK CABAN :
NO. REKENIN :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN (Rp)		PENGELUARAN (Rp)			SALDO (Rp)
				SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

.....,

Bendahara,

(.....)

Cara pengisian :
 Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
 Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
 Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
 Kolom 4: diisi dengan bukti transaksi.
 Kolom 5: diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
 Kolom 7 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
 Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
 Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
 Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

Q.2. Buku Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU PAJAK
KAMPUNG..... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

.....,

Bendahara,

(.....)

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau pengeluaran (dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR
KAMPUNG..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung- jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

.....,

Bendahara,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Kampung.

R. Format Kuitansi

Kantor Kampung	:	
Kabupaten	:	
Tanda Bukti Pengeluaran Uang		
Telah terima dari Bendahara Kampung		
Uang sebesar	:	Rp,- (.....)
Sebagai pembayaran	:	<...Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....> <...Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)..> <...Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)..>
Catatan Keuangan :		
	
Yang Memberi,		Yang Menerima,
<..Nama Pemberi..>		<...Nama Penerima...>

S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester Pertama

**LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKUNING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6
a	b	c	a	b	c	d				
			4				PENDAPATAN			
			4	1			PAKampung			
			4	1	1		Hasil usaha			
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>			
			4	2			Transfer			
			4	2	1		Dana Kampung			
			4	3			Pendapatan lain-lain			
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kampung			
			4	3	1	<Obyek Pendapatan> dst...			
							JUMLAH PENDAPATAN			
				5			BELANJA			
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung			
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung			
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Penghulu			
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>			
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium <Rincian Obyek Belanja>			
2							Pelaksanaan Pembangunan Kampung			
2	1						Pendidikan			
2	1	5					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3			Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKampungk			

1			2				3	4	5	6
a	b	c	a	b	c	d				
5	1						Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
		dst								
							JUMLAH BELANJA			
							SURPLUS /(DEFISIT)			
			6				PEMBIAYAAN			
			6	1			Penerimaan Pembiayaan			
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	1	1	01	SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	01	Pembentukan Dana Cadangan			
		dst								
							SELISIH PEMBIAYAAN			

..... 20....

Penghulu,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : sifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. Sub Bidang; dan
- c. kegiatan.

Kolom 2 : ri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan;
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : rbiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : nggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : nggaran yang digunakan

Kolom 6 : er Dana yang digunakan dalam kegiatan
(kolom 1.c) terkait

T. Format Laporan Keuangan

Lampiran : Peraturan Kampung.....

Nomor :

Tahun : 20...

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 20...**

Daftar Isi

halaman

I	Laporan Realisasi APBKampung	x
II	Catatan Atas Laporan Keuangan	x
	A. Informasi Umum	x
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	x
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
	1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	x
	2 Pendapatan Asli Kampung	x
	3 Dana Kampung	x
	4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	x
	5 Alokasi Dana Kampung	x
	6 Bantuan Keuangan Propinsi	x
	7 Bantuan Keuangan Kabupaten	x
	8 Pendapatan Lain lain	x
	9 Belaja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	x
	10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	x
	11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kampung	x
	12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Kampung	x
	13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung	x
	14 Belanja Kampung dalam Klasifikasi Ekonomi	x
	15 Belanja Kampung dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
	16 Pembiayaan	x
	17 Aset Kampung	x
	18 Penyertaan Modal Kampung	x
	19	x
Lampiran		
Lampiran	1 - Rincian Aset Tetap Kampung	x
Lampiran	2 -	x

T.1. Format Laporan Realisasi APBKampung

LAPORAN REALISASI APBKAMPUNG PEMERINTAH KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 20...				
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Kampung	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Transfer				
Dana Kampung	C.3	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Alokasi Dana kampung	C.5	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Lain lain	C.8	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	C.9 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	C.10 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kampung	C.11 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	C.12 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung	C.13 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH BELANJA	C.14	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT)		xx.xxx	xx.xxx	xx
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
PEMBIAYAAN NETTO		xx.xxx	xx.xxx	xx
SILPA TAHUN BERJALAN				
		xxx	xxx	xxx

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

T.2. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kampung, Kecamatan, Kabupaten Tahun Anggaran 20.....

A. Informasi Umum

Pemerintah Kampung ABC merupakan Kampung Kampung di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kampung ABC:

1. Kepala Kampung : XXXXX
2. Sekretaris Kampung : YYYYY
3. Bendahara Kampung : ZZZZZ

Kantor Pemerintahan Kampung beralamat di, Kampung Kampung , Kecamatan KLM, Kabupaten

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kampung berupa Laporan Realisasi APBKampung sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1		<u>XXX</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	XXX	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	XXX	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>(XXX)</u>	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		<u>XXX</u>
Saldo Kas per 31 Desember 20x1		<u>X.XXX</u>

2 Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan Asli Kampung terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
a. Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
b. Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
d. Lain-lain PADes yang sah	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

3 Dana Kampung

Dana Kampung merupakan penerimaan Kampung yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Kampung selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Kampung yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

5 Alokasi Dana Kampung (ADD)

Penerimaan Kampung yang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADD) adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

6 Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Kampung yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

7 Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Kampung yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

8 Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung dengan pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bunga bank	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

9 Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

10 Belanja - Bidang Pembangunan Kampung

Belanja untuk Bidang Pembangunan Kampung terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

13 Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKampungk Kampung

Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Kampung melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

14 Belanja Kampung dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tunjangan BPD	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Jasa Honorarium	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Operasional Aparatur Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Jasa Sewa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Operasional Perkantoran	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Pemeliharaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
Belanja Modal	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
Belanja Modal Pengadaan Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal lainnya	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

15. Belanja Kampung dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Kampung			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanahan	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
Bidang Pembangunan Kampung			
Sub Bidang Pendidikan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kesehatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kawasan Permukiman	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pariwisata	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKampungk Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Keadaan Darurat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Keadaan MenKampungk.	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
2. Pencairan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
3. Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang dipisahkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
2. Penyertaan Modal Kampung	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

17. Aset Kampung

Perolehan aset Kampung adalah sebagai berikut,

	20 x 0	20 x 1	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Aset Tetap lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Kampung

Penyertaan Modal Kampung pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	20x0	20x1	Penambahan (Pengurangan)
BUMDes XXX	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
BUMDes YYY	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

19. dst

T.2.b. Format Rincian Aset Tetap Desa

PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 20xx

Rincian Aset Tetap Kampung per 31 Desember 20xx

(contoh)

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Kode Aset Tetap	Tahun	Nilai Perolehan	Kondisi	Keterangan
		Jenis	Nomor					
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Tanah 1. Tanah Persil A , Luas 2200 m ² 2. Tanah Lapangan X , Luas 1000 m 3.	HGB	230/2014	2 Juli 2014	50.000.000	Baik Rusak ringan	Nilai perolehan belum diketahui
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 1. Komputer/pc 2. 3.	2014	5.000.000	Baik	
III.	Kendaraan 1. Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS BPKB 2. 3.	1231212	4 Des. 2014	2014	10.000.000	Baik	
IV.	Gedung dan Bangunan 1. Bangunan Kantor, Luas 200 m ² 2. 3.	IMB	432	2 Juli 2010	2010	120.000.000	Baik	
V.	Jalan 1. Jalan Desa Lokasi di, 800m 2. 3.	2014	50.000.000	Baik	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Jembatan								
	1. Jembatan XYZ Lokasi di, 50m					2014	40.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
VII.	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase								
	1. Embung XYZ, Lokasi di					2014	40.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
VIII.	Jaringan /Instalasi								
	1. Jaringan Listrik Desa, Lokasi di					2014	40.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
IX.	Aset Tetap Lainnya								
	1. 3 (tiga) ekor sapi					2014	30.000.000		
	2.		
	3.		
X.	Konstruksi dalam pengerjaan								
	1. Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi				Konstruksi 201	65.000.000	Baik	
	2.	
	3.	
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx						450.000.008		

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Kaur/Juru Tulis

ttd

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
TAHUN ANGGARAN.....**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA			REALISASI			Dana kampung (Rp)	Alokasi Dana kampung (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain	
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)					Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.....
Penghulu,
(ttd)
.....

Keterangan :

Kolom 1 : diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:

- a. Untuk Kode rekening Bidang;
- b. Kode Rekening Sub Bidang; dan
- c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2 : diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Kampung yang telah dilaksanakan.

Kolom 3 : diisi nama output dari kegiatan

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket dll

Kolom 6 : diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.

Kolom 8 : diisi satuan volume.

Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan.

Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Kampung (DK).

Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DK dan ADK.

Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan / atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

**PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE KAMPUNG**

KAMPUNG ;

KECAMATAN ;

KABUPATEN SIAK ;

PROVINSI ;

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8

..... 20....

Penghulu,

(.....)

T.3.a. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN.....**

REALISASI S/D (tgl) (bln) (thn)

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1								
a	b	c	d	e				
4					PENDAPATAN			
4	1				PAKampung			
4	1	1			Hasil usaha			
4	1	2			Hasil Aset Kampung			
4	1	3			Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong			
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Kampung			
4	2				Transfer			
4	2	1			Dana Kampung			
4	2	2			Bagiandari hasil Pajak dan Restribbusi Daerah Kabupaten			
4	2	3			Alokasi Dana Kampung			
4	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi			
4	2	5			Bantuan Keuangan Kabupaten			
4	2	6			Transfer lainnya			
4	3				Pendapatan lain-lain			
4	3	1			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kampung			
4	3	2			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga			
4	3	3			Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung			
4	3	4			Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			
4	3	5			koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kampung pada tahun anggaran berjalan			
4	3	6			Bunga bank			
4	3	9			Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah			
					JUMLAH PENDAPATAN			
5					BELANJA			
5	1				Belanja Pegawai			
5	1	1			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu			
5	1	2			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung			
5	1	3			Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat			
5	1	4			Tunjangan BAPEKAM			
5	2				Belanja Barang dan Jasa			
5	2	1			Belanja Barang Perlengkapan			
5	2	2			Belanja Jasa Honorarium			
5	2	3			Belanja Perjalanan Dinas			
5	2	4			Belanja Jasa Sewa			
5	2	5			Belanja Operasional Perkantoran			
5	2	6			Belanja Pemeliharaan			
5	2	7			Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			

1					2	3	4	5
a	b	c	d	e				
5	3				Belanja Modal			
5	3	1			Belanja Modal Pengadaan Tanah			
5	3	2			Belanja Modal Pengadaan Peralatan, mesin dan alat berat			
5	3	3			Belanja Modal kendaraan			
5	3	4			Belanja Modal gedung, bangunan, taman			
5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			
5	3	6			Belanja Modal Jembatan			
5	3	7			Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/ Drainase/Air Limbah/Persampahan			
5	3	8			Belanja Modal Jaringan/Instalasi			
5	3	9			Belanja Modal Lainnya			
5	4				Belanja Tak Terduga			
5	4	1			Belanja Tak Terduga			
					JUMLAH BELANJA			
					SURPLUS / (DEFISIT)			
6					PEMBIAYAAN			
6	1				Penerimaan Pembiayaan			
6	1	1			SILPA Tahun Sebelumnya			
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan			
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Kampung Yang Disahkan			
6	2				Pengeluaran Pembiayaan			
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan			
6	2	2			Penyertaan Modal Kampung			
6	2	9			Pengeluaran Pembiayaan lainnya			
					Pembiayaan Netto			
					SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)			

..... 20....

Bupati

(.....)

*) FORMAT DIKIRIM DALAMBENTUK

1. SOFTCOPY melalui email; keudes@gmail.com

2. HARDCOPY ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan tembusan gubernur

T.3.b. Format Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan APBKampung

**LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....**

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	PENDAPATAN (Rp.)		BELANJA (Rp.)		PEMBILAYAN NETTO (Rp.)		SILPA TAHUN BERJALAN (Rp.)					
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	KECAMATAN												
1.1.	Kampung												
1.2.	Kampung												
1.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
2	KECAMATAN												
2.1.	Kampung												
2.2.	Kampung												
2.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
3	KECAMATAN												
3.1.	Kampung												
3.2.	Kampung												
3.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
	JUMLAH TOTAL												

.....
BUPATI
(tttd)

T.3.c. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kampung
LAPORAN REKAPITULASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	ANGGARAN PENDAPATAN KAMPUNG (Rp.)			REALISASI PENDAPATAN KAMPUNG (Rp.)			SISA ANGGARAN (Rp.)			
		PAK	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAK	TRANSFER		LAIN-LAIN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	KECAMATAN										
1.1.	Kampung										
1.2.	Kampung										
1.3.	Kampung										
	dst.										
	JUMLAH										
2	KECAMATAN										
2.1.	Kampung										
2.2.	Kampung										
2.3.	Kampung										
	dst.										
	JUMLAH										
3	KECAMATAN										
3.1.	Kampung										
3.2.	Kampung										
3.3.	Kampung										
	dst.										
	JUMLAH										
	JUMLAH TOTAL										

.....
BUPATI
(ttd)

T.3.d. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kampung
LAPORAN REKAPITULASI
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....

PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	ANGGARAN BELANJA KAMPUNG (Rp.)				REALISASI BELANJA KAMPUNG (Rp.)				SISA ANGGARAN (Rp.)			
		PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL		TAK TERDUGA	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	KECAMATAN												
1.1.	Kampung												
1.2.	Kampung												
1.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
2	KECAMATAN												
2.1.	Kampung												
2.2.	Kampung												
2.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
3	KECAMATAN												
3.1.	Kampung												
3.2.	Kampung												
3.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
	JUMLAH TOTAL												

.....
BUPATI
(ttd)

T.3.e. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Kampung
LAPORAN REKAPITULASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....

PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	PENENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp.)			PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp.)			PEMBIAYAAN NETTO (Rp.)				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	KECAMATAN											
1.1.	Kampung											
1.2.	Kampung											
1.3.	Kampung											
	dst.											
	JUMLAH											
2	KECAMATAN											
2.1.	Kampung											
2.2.	Kampung											
2.3.	Kampung											
	dst.											
	JUMLAH											
3	KECAMATAN											
3.1.	Kampung											
3.2.	Kampung											
3.3.	Kampung											
	dst.											
	JUMLAH											
	JUMLAH TOTAL											

.....
BUPATI
(tttd)

**T.3.f. Format Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan APBKampung Menurut Bidang Kewenangan
 LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 MENURUT BIDANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN.....**

PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	ANGGARAN (Rp.)					REALISASI (Rp.)					SISA ANGGARAN (Rp.)	
		BIDANG 1	BIDANG 2	BIDANG 3	BIDANG 4	BIDANG 5	JUMLAH	BIDANG 1	BIDANG 2	BIDANG 3	BIDANG 4		BIDANG 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	KECAMATAN												
1.1.	Kampung												
1.2.	Kampung												
1.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
2	KECAMATAN												
2.1.	Kampung												
2.2.	Kampung												
2.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
3	KECAMATAN												
3.1.	Kampung												
3.2.	Kampung												
3.3.	Kampung												
	dst.												
	JUMLAH												
	JUMLAH TOTAL												

.....
BUPATI
(tttd)

T.3.g. Format Laporan Anggaran dan Realisasi penggunaan Dana Kampung
LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
MENURUT PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMKampung
TAHUN ANGGARAN.....

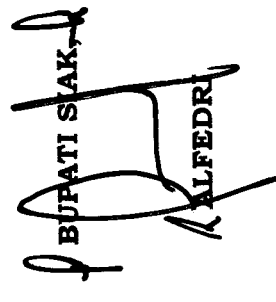
PROVINSI :
 KABUPATEN :

REALISASI S.D (TGL.) (BLN) (THN)

KODEFIKASI KECAMATAN/ KAMPUNG	NAMA KECAMATAN/ NAMA KAMPUNG	PENYERTAAN MODAL TAHUN		PENYERTAAN MODAL TAHUN		PENYERTAAN MODAL TAHUN				
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KECAMATAN									
1.1.	Kampung									
1.2.	Kampung									
	dst.									
	JUMLAH									
2	KECAMATAN									
2.1.	Kampung									
2.2.	Kampung									
	dst.									
	JUMLAH									
3	KECAMATAN									
3.1.	Kampung									
3.2.	Kampung									
	dst.									
	JUMLAH									
	JUMLAH TOTAL									

Keterangan :
 * Penyertaan modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir

 BUPATI
 (tttd)


 BUPATI SAK,
 ALFRED



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
E-mail: dpmkkabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 24 Desember 2021

Nomor : 140/DPMK-PKK/460
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Konsep
Peraturan Bupati

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
c.q Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Siak

di -
Tempat

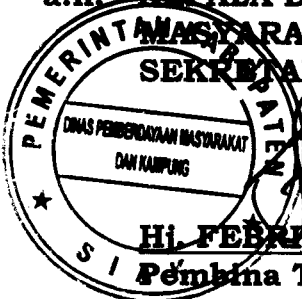
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak konsep Peraturan Bupati Siak tentang **Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan adanya masukan dan saran agar konsep Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
SEKRETARIS,**



HI. FEBRYENNI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780212 199702 2 001